

## Peran Kepala Sekolah Dalam Optimalisasi Pelaksanaan Merdeka Belajar Pada Masa Pandemi di Daerah 3T

### *The Role of the Principal in Optimizing the Implementation of Free Learning During the Pandemic Period in the 3T Region*

Didimus Sutanto B. Prasetya<sup>1</sup>, Candra Gunawan Marisi<sup>2</sup>, Efvi Noyita<sup>3</sup>, Go Heeng<sup>4</sup>, Dewi Lydia<sup>5</sup>

<sup>1</sup>STAKPN Sentani, <sup>2,3,4,5</sup>STT Real Batam

Email korespondensi: dimuss4jc@gmail.com

#### **Abstrak:**

Peningkatan kualitas pendidikan terus dilakukan oleh pemerintah, seperti perbaikan kurikulum dan program terbaru adalah program merdeka belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Merdeka belajar adalah upaya menghadirkan kemerdekaan siswa untuk mengembangkan potensi/bakat yang dimilikinya melalui pembelajaran. Hadirnya pandemi Covid 19 mengharuskan pembelajaran dilaksanakan secara daring melalui *platform* digital. Minimnya sarana dan prasarana, seperti infrastruktur internet yang tidak memadai menjadi salah satu persoalan tersendiri di daerah 3T dalam melaksanakan pembelajaran pada program merdeka belajar. Peran kepala sekolah menjadi kunci vital terlaksananya pembelajaran di daerah 3T pada masa pandemi ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Implementasi peran kepala sekolah dalam mewujudkan merdeka belajar pada masa pandemi di daerah 3T di wilayah Kabupaten Natuna; (2) Peran kepala sekolah di daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal) di wilayah Kabupaten Natuna dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru SMP dalam mewujudkan merdeka belajar. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan atau *library research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran kepala sekolah pada jenjang SMP di wilayah 3T di Kabupaten Natuna dalam mewujudkan merdeka belajar pada masa pandemi belum terlaksana secara optimal. Lokasi yang sulit dijangkau, kurangnya sarana dan prasarana, baik buku maupun akses internet menjadi kendala. (2) Peran kepala sekolah di wilayah 3T di wilayah Kabupaten Natuna dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru SMP masih terkendala oleh kurangnya ketersediaan guru mata pelajaran yang sesuai dengan bidang keahliannya sehingga banyak mata pelajaran yang diajarkan oleh guru yang tidak sesuai dengan bidang studinya.

**Kata kunci:** kepala sekolah; daerah 3T; merdeka belajar; pandemic

#### **Abstract**

*The government continues to improve the quality of education, such as curriculum improvements and the latest program is the independent learning program launched by the Minister of Education and Culture, Nadiem Makarim. Freedom of learning is an effort to bring students' independence to develop their potential/talents through learning. The presence of the*

*Covid-19 pandemic requires learning to be carried out online through digital platforms. The lack of facilities and infrastructure, such as inadequate internet infrastructure, is one of the problems in the 3T area in carrying out learning in the independent learning program. The role of the principal is a vital key to the implementation of learning in the 3T area during this pandemic. The purpose of this study was to determine (1) the implementation of the principal's role in realizing independent learning during the pandemic in the 3T area in the Natuna Regency area; (2) The role of school principals in the 3T (outermost, foremost, underdeveloped) areas in the Natuna Regency area in improving the competence and professionalism of junior high school teachers in realizing independent learning. The method in this research is qualitative with a library research approach. The results of the study indicate that (1) the role of the principal at the junior high school level in the 3T region in Natuna Regency in realizing independent learning during the pandemic has not been carried out optimally. Locations that are difficult to reach, lack of facilities and infrastructure, both books and internet access are obstacles. (2) The role of school principals in the 3T area in the Natuna Regency in improving the competence and professionalism of junior high school teachers is still constrained by the lack of availability of subject teachers that are in accordance with their fields of expertise so that many subjects taught by teachers are not in accordance with their field of study.*

**Keywords:** principal; 3T area; free to learn; pandemic

## Pendahuluan

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas adalah suatu keharusan di era globalisasi ini. Persaingan yang begitu terbuka dengan SDM asing menuntut peningkatan kualitas daya saing agar mampu memenangkan persaingan global. Upaya peningkatan kualitas SDM terus dilakukan oleh pemerintah melalui perbaikan sistem Pendidikan Nasional kita. Di mana, sistem pendidikan di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan kurikulum, hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kemajuan dan juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang komprehensif dan mutakhir. Perubahan kurikulum adalah sebuah keniscayaan. Kurikulum merupakan “roh” pendidikan yang harus dievaluasi secara inovatif, dinamis, dan berkala sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS), kompetensi yang

diperlukan masyarakat dan pengguna lulusan.<sup>1</sup> Kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan mutu pendidikan di Negara lain, seperti ditunjukkan<sup>2</sup> pada data: (1) Hasil survei *Political and Economic Risk Consultant* (PERC), Indonesia berada di posisi 12 dari 12 negara Asia, di mana Indonesia berada di bawah negara Vietnam. (2) *The World Economic Forum* Swedia (2015) didapati suatu data bahwa Indonesia memiliki daya saing yang rendah, hanya menduduki posisi 69 dari 76 negara yang disurvei di dunia. Kemudian kualitas para gurunya, Indonesia hanya level 14 dari 14 negara berkembang di dunia. Data yang paling memprihatinkan adalah di mana

<sup>1</sup> Maman Suryaman, “Orientasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar,” *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra* 1, no. 1 (2020): 13–28.

<sup>2</sup> Edi Harapan, “Visi Kepala Sekolah Sebagai Penggerak Mutu Pendidikan,” *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)* 1, no. 2 (2017): 133–145.

Indonesia berpredikat sebagai *follower* bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia. Peringkat umum matematika, sains pada anak usia 15 tahun dicapai oleh negara Singapore di ranking pertama. Selanjutnya negara yang menduduki rangking pertama pada potensi pertumbuhan ekonomi adalah Negara Ghana dengan angka 3.881. (3) *Programme For International Student Assesment* (PISA) pada tahun 2019, menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal, yaitu di mana pada bidang matematika dan literasi berada pada urutan ke-74 dari 79 negara<sup>3</sup>.

Berpijak dari hal tersebut, maka teretuslah kebijakan merdeka belajar. Hal ini didorong oleh keinginan untuk menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Kemerdekaan belajar sering dimaknai dalam arti sebagai kebebasan yang sesungguhnya. Permasalahan yang terjadi adalah masih banyak dijumpai upaya pengekangan di mana-mana, khususnya dalam pendidikan. Guru dan murid belum merasakan otonomi yang cukup untuk menentukan arah kebijaksanaan belajar dan mengajarnya karena masih diatur dengan regulasi yang membuat rencana, proses pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan terkesan dibatasi dan mengikat. Dalam pelaksanaan kebijakan merdeka belajar, peran kepala sekolah sangat vital dalam menggerakkan tim pendidik di lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Tinggi rendahnya mutu pendidikan tidaklah terlepas

dari peran dan tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah.

Layanan strategis bagi perwujudan tujuan di atas adalah adanya layanan ahli kependidikan yang berhasil guna dan berdaya guna tinggi, seperti *student active learning*. Penerapan ajaran *tut wuri handayani* merupakan wujud nyata yang bermakna bagi manusia masa kini dalam rangka menjemput masa depan. Untuk melaksanakan diperlukan penanganan yang memberikan perhatian terhadap aspek strategis pendekatan yang tepat ketika individu belajar<sup>4</sup>.

Ditambah lagi persoalan pembelajaran di masa pandemi *Covid 19* ini, di mana pemerintah mewajibkan pembelajaran dilakukan secara daring, yaitu proses pembelajaran yang menggunakan teknologi komunikasi yang dilakukan secara *online* menggunakan aplikasi pembelajaran. Proses pembelajaran tidak dilakukan dengan tatap muka, tetapi materi pembelajaran dan evaluasi pembelajaran diberikan secara *online*.<sup>5</sup> Pembelajaran secara *online* mungkin tidak menjadi kendala bagi daerah yang memiliki infrastruktur sarana internet yang menunjang, tetapi bagi daerah di wilayah 3T (terluar, terdepan dan tertinggal) yang belum memiliki sarana infrastruktur internet yang memadai akan jadi kendala tersendiri. Peran kepala sekolah di daerah 3T tentunya memiliki suatu tantangan tersendiri dalam proses pelaksanaannya. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Rosadi bahwa salah satu faktor

<sup>3</sup> Siti Mustaghfiroh, "Konsep 'Merdeka Belajar' Perspektif Aliran Progresivisme Jhon Dewey," *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran* 3, no. 1 (2020): 141–147.

<sup>4</sup> Nofri Hendri, "MERDEKA BELAJAR; ANTARA RETORIKA DAN APLIKASI," *Seminar Nasional: Jambore Konseling* 3 08, no. 01 (2020): 1–29.

<sup>5</sup> Kompyang Sri Wahyuningsih, "Problematisa Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19 Di Sma Dharma Praja Denpasar," *Jurnal Pangkaja* 24, no. 1 (2021): 107–118.

terlaksananya pembelajaran daring adalah peran kepala sekolah dalam membuat strategi dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ).<sup>6</sup>

Daerah 3T merupakan daerah yang memiliki kriteria terluar, terdepan dan tertinggal. Kabupaten Natuna merupakan salah satu wilayah Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang termasuk ke dalam kategori 3T yang berbatasan dengan wilayah negara lain. Geografis wilayah yang terdiri dari pulau-pulau, terdiri dari 154 pulau, dengan 27 pulau (17,53%) yang berpenghuni dan terdapat 127 pulau (82,44%) tidak berpenghuni. Luas wilayah daratan Kabupaten Natuna adalah 2009,04 km<sup>2</sup>, transportasi air untuk menghubungkan antar pulau yang paling banyak digunakan.<sup>7</sup> Hal ini menjadikan wilayah masih sulit diakses, di mana terkendala dengan infrastruktur baik jalan maupun jaringan internet belum memadai. Perhatian pemerintah dalam bidang Pendidikan di daerah 3T sangat penting dilakukan, karena pemerataan Pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah 3T, sehingga dapat berdaya saing guna memajukan daerahnya. Oleh karenanya, peran kepala sekolah di daerah 3T memiliki peranan penting untuk mewujudkan merdeka belajar guna meningkatkan kualitas pendidikan dan memajukan SDM di daerahnya.

Kabupaten Natuna awalnya terdiri dari 12 kecamatan, kemudian pada 10 Desember 2014 dimekarkan menjadi 15 kecamatan.<sup>8</sup> Terdapat

40 Sekolah Menengah Pertama, yang terdiri dari 28 sekolah merupakan sekolah Negeri sedangkan 12 sekolah merupakan sekolah swasta. Secara lebih khusus wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan daerah 3T adalah 8 kecamatan, yaitu: kecamatan Midai, Serasan, Subi, Pulau Laut, Pulau Tiga, Serasan Timur, Pulau Tiga Barat dan Suak Midai. Di mana dari 8 kecamatan tersebut terdapat 15 SMP, terdiri dari 11 merupakan SMP Negeri dan 4 lainnya merupakan SMP Swasta. Dari 8 kecamatan tersebut, hanya kecamatan Suak Midai yang belum ada SMP-nya. Berdasarkan hasil observasi awal mengenai peran kepala sekolah pada 7 kecamatan tersebut belum terlaksana secara maksimal, disebabkan oleh banyaknya hambatan seperti akses antar wilayah yang terbatas sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang lebih, hal ini yang menjadi penghalang utama dalam melaksanakan merdeka belajar.

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peran kepala sekolah di masa pandemi adalah penelitian Rosadi, di mana penelitiannya dilakukan pada jenjang sekolah tingkat SMP yang memiliki sarana infrastruktur yang memadai, tetapi ditemukan adanya faktor yang menghambat proses pelaksanaan pembelajaran daring, yaitu sarana dan kemampuan guru dalam menggunakan teknologi komunikasi dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ).<sup>9</sup> Sementara di daerah 3T yang memiliki permasalahan infrastruktur sarana internet yang tidak memadai akan menjadi suatu temuan yang sangat penting mengenai bagaimana peran kepala sekolah dalam upaya optimalisasi merdeka belajar di masa pandemi

<sup>6</sup> Adi Rosadi, Muh Hasan Marwiji, and Eneng Yeni Mariah, "Strategi Kepala Sekolah Dalam Pembinaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)," *Jurnal Jendela Pendidikan* 1, no. 3 (2021): 112–118.

<sup>7</sup> BPS Kabupaten Natuna, *KABUPATEN NATUNA DALAM ANGKA Natuna Regency in Figures 2021* (Natuna, 2021).

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

ini. Terbatasnya infrastruktur internet juga menjadi kesulitan tersendiri bagi kepala sekolah dalam peranannya meningkatkan kompetensi dan profesional guru serta terbatasnya guru bidang studi yang sesuai dengan bidang studinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Implementasi peran kepala sekolah dalam mewujudkan merdeka belajar pada masa pandemi di daerah 3T di wilayah Kabupaten Natuna; (2) Peran kepala sekolah di daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal) di wilayah Kabupaten Natuna dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru SMP dalam mewujudkan merdeka belajar. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang peran kepala sekolah dalam optimalisasi merdeka belajar pada masa pandemi pada di daerah 3T khususnya di Kabupaten Natuna.

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif<sup>10</sup> dengan pendekatan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan kajian. Subyek dalam penelitian ini adalah pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru pada 15 SMP di 7 kecamatan daerah 3T wilayah Kabupaten Natuna yang juga terdampak di masa pandemi Covid 19 ini. Teknik analisis data menggunakan observasi, dibandingkan dengan informasi dari data-data

terdahulu yang dipandang peneliti memiliki kaitan dengan topik pembahasan<sup>11</sup>.

### Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam mengembangkan kualitas pendidikan sekolah. Dapat terlaksana atau tidak tujuan pendidikan sangat tergantung pada kecakapan dan kebijaksanaan kepala sekolah sebagai pendidik sekaligus pemimpin. Hal ini senada dengan penelitian Novi Hardini Putri yang menyatakan bahwa kepala sekolah memiliki pengaruh terhadap keberhasilan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah).<sup>12</sup> Salah satu peran kepala sekolah adalah melakukan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan di sekolahnya, hal ini tertuang dalam Permendikbud No. 6 tahun 2018 pasal 15 ayat 1, yang menyatakan “bahwa beban kepala sekolah sepenuhnya melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan”.<sup>13</sup> Seperti hasil penelitian Sanoto di mana penelitian tentang supervisi di daerah 3T, yaitu di Kabupaten Bengkayang belum berjalan secara baik disebabkan oleh beberapa aspek, seperti jangkauan wilayah yang luas, jumlah pengawas

<sup>11</sup> Hengki Wijaya, Fransiskus Irwan Widjaja, and Dkk, *Strategi Menulis Jurnal Untuk Ilmu Teologi* (Semarang: Golden Gate Publishing, 2020).

<sup>12</sup> Novi Hardini Putri and Udik Budi Wibowo, “Pengaruh Kinerja Kepala Sekolah Terhadap Keberhasilan Manajemen Berbasis Sekolah Melalui Partisipasi Masyarakat Di SMP,” *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 6, no. 1 (2018): 45–59.

<sup>13</sup> Muhadjir Effendy, “Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah,” *Kemdikbud* (2018): 1–21.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: Alfabet, 2012).

sekolah yang sedikit dibandingkan dengan jumlah sekolah dan jarak antar sekolah yang jauh, serta proses supervisi yang belum dilaksanakan sesuai pedoman atau prosedur yang baik karena keterbatasan jarak, waktu dan biaya.<sup>14</sup>

### **Implementasi Peran Kepala Sekolah Dalam Mewujudkan Merdeka Belajar di SMP daerah 3T**

Peran kepala sekolah yang dilaksanakan di daerah 3T di fokuskan pada 7 kecamatan, di Kabupaten Natuna, yaitu: kecamatan Midai, Serasan, Subi, Pulau Laut, Pulau Tiga, Serasan Timur dan Pulau Tiga Barat dengan melibatkan pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru tingkat SMP. Dari tujuh kecamatan tersebut, terdapat 15 sekolah tingkat SMP, 154 guru dan siswa sebanyak 1.048 siswa<sup>15</sup>. Untuk melihat implementasi peran kepala sekolah dalam menerapkan merdeka belajar dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Program Pemerintah Merdeka Belajar**

Merdeka belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju, Nadiem Anwar Makarim.<sup>16</sup> Esensi kemerdekaan berpikir, menurut Nadiem, harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya kepada para peserta didiknya.

Nadiem menyebut, dalam kompetensi guru di level apa pun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi.

Terjadi perubahan sistem pengajaran dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas akan menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman, karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan *outing class*, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdas dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem *ranking* yang menurut beberapa survei hanya meresahkan anak dan orang tua saja, karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang masing-masing. Nantinya, akan terbentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten, serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat.

Peran dunia pendidikan dalam tugas pembinaan membangun semangat kebangkitan nasional pada peserta didik adalah sebagai alat untuk memperbaiki kehidupan sekarang dan selanjutnya untuk merencanakan generasi di masa yang akan datang menjadi lebih baik, sejahtera dan menghargai kesetaraan sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Pendidikan karakter berbasis semangat kebangsaan yang diakomodir dalam beberapa mata pelajaran harus mewujudkan komitmen kebangsaan terhadap NKRI, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945 dan Pancasila serta kesadaran adanya perbedaan dalam unsur pembentuk

<sup>14</sup> Herry Sanoto et al., "Pengaruh Supervisi Akademik Terhadap Peningkatan Kompetensi Guru Di Daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal)," ... : *Jurnal Pendidikan dan ...* 11, no. 2 (2021): 166–172.

<sup>15</sup> BPS Kabupaten Natuna, *KABUPATEN NATUNA DALAM ANGKA Natuna Regency in Figures 2021*.

<sup>16</sup> Mustaghfiroh, "Konsep 'Merdeka Belajar' Perspektif Aliran Progresivisme Jhon Dewey."

bangsa<sup>17</sup>. Semuanya tentunya adalah standar pencapaian yang harus diperoleh dalam upaya mewujudkan sekolah merdeka belajar sebagai *Students Center*.

#### **b. Memimpin dan Mengelola Lembaga Satuan Pendidikan**

Pasal 1 ayat 1 Permendikbud No.6 tahun 2018 menyatakan bahwa “kepala sekolah adalah guru yang diberikan tugas untuk memimpin dan mengelola satuan Pendidikan di mana dia ditugaskan.” Kemudian Pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa “beban kepala sekolah sepenuhnya melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.” Berdasarkan hal inilah kemudian kepala sekolah menjalankan tupoksinya dalam kepemimpinannya serta mengelola semua hal yang berkaitan dengan operasional sekolah, mulai dari pekerjaan administratif kepala sekolah hingga manajerial. Mengurusi segala hal yang berkaitan dengan SDM hingga sarana prasarana sekolah, adalah bagian dari wewenang dan tanggung jawabnya sebagai seorang pimpinan di satuan Lembaga Pendidikan Sekolah<sup>18</sup>.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah maka seorang kepala sekolah haruslah

memiliki 5 kompetensi dalam menjalankan kepemimpinannya di sekolah, yaitu (a) kompetensi manajerial, (b) kompetensi kewirausahaan, (c) kompetensi supervisi, (d) kompetensi kepribadian, dan (e) kompetensi social<sup>19</sup>.

#### **c. Mengembangkan dan Meningkatkan Mutu Sekolah Berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)**

Ayat 2 dalam Pasal 15 Permendikbud No. 6 tahun 2018 dinyatakan bahwa “beban kerja sebagaimana ayat 1 dimaksud di atas adalah bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional Pendidikan.” Adapun yang termasuk dalam 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) ini dilakukan ukuran melalui mutu sekolah. Seorang Kepala Sekolah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkannya melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang saat ini diberlakukan oleh Kemendikbud.<sup>20</sup>

Sistem penjaminan mutu di Indonesia salah satunya diatur melalui Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah.<sup>21</sup> Permendikbud ini menjelaskan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses

<sup>17</sup> Rita Evimalinda, Rikardo Dayanto Butar-butur, and Efvi Noyita, “Membangun Semangat Kebangkitan Nasional Melalui Konten Pendidikan Agama Kristen Multikultural,” *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta* 4, no. 1 (2021): 54–68.

<sup>18</sup> Effendy, “Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.”

<sup>19</sup> Bambang Sudibyo, “PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA No. 13 Tahun 2007” (Indonesia: Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, 2007).

<sup>20</sup> Effendy, “Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.”

<sup>21</sup> Muhadjir Effendy, “Permendikbud No. 28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Dan Menengah,” *Kemdikbud* (2016): 1–18.

terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Tujuan sistem penjaminan mutu yaitu menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.

Sistem penjaminan mutu memiliki fungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Dikdasmen dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Dikdasmen. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Dikdasmen adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Dikdasmen berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Dikdasmen mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh satuan pendidikan dan dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan.

Agar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berjalan dengan baik di satuan pendidikan, diperlukan unsur penjaminan mutu dalam bentuk tim penjaminan mutu sekolah yang independen di luar manajemen sekolah yang setidaknya terdiri dari unsur manajemen, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilaksanakan oleh Kepala Sekolah melalui 5 (lima) siklus tahapan yaitu: (1) Pemetaan Mutu, dilaksanakan melalui kegiatan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) berdasarkan SNP. (2) Penyusunan Rencana Peningkatan Mutu, dilaksanakan dengan menyusun rencana pengembangan sekolah dan rencana aksi yang didasarkan pada peta mutu, kebijakan Pemerintah (kurikulum dan SNP), serta rencana strategis pengembangan sekolah. (3) Pelaksanaan Rencana Peningkatan Mutu, melalui pemenuhan mutu pendidikan dan capaian SNP yang di laksanakan dalam pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran. (4) Monitoring dan Evaluasi, dilakukan untuk memastikan pelaksanaan peningkatan mutu berjalan sesuai rencana yang telah disusun dan dituangkan dalam laporan pelaksanaan pemenuhan SNP dan implementasi rencana pemenuhan mutu oleh satuan pendidikan. Monitoring dan evaluasi juga menghasilkan rekomendasi tindakan perbaikan, dengan demikian maka akan ada jaminan kepastian keberlanjutan terjadinya peningkatan mutu. (5) Penetapan Standar Mutu Baru dan Strategi Peningkatan Mutu, melalui penyusunan strategi peningkatan mutu dari capaian sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dengan penetapan standar mutu baru yang lebih tinggi guna

membangun budaya mutu di satuan pendidikan.

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. SPME dilaksanakan oleh unit di luar satuan pendidikan. SPME Dikdasmen direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, BSNP, dan BAN-S/M sesuai dengan kewenangannya. Siklus SPME Dikdasmen dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang terbagi menjadi tiga kelompok yaitu: (1) siklus fasilitasi peningkatan mutu. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemetaan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan, perencanaan peningkatan mutu melalui rencana strategis pembangunan pendidikan, fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan, monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu dan fasilitasi peningkatan mutu secara berkelanjutan oleh pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dalam melakukan fasilitasi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen), Kemendikbud dibantu oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). Fasilitasi oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh dinas pendidikan provinsi dibantu oleh tim penjaminan mutu pendidikan provinsi dan berkoordinasi serta kerja sama dengan 26 Ditjen Dikdasmen, Kemendikbud. Pemerintah kabupaten/kota

melakukan fasilitasi yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dibantu oleh tim penjaminan mutu pendidikan kabupaten/kota dan berkoordinasi serta kerja sama dengan Ditjen Dikdasmen, Kemendikbud. (2) siklus pengembangan standar mutu pendidikan dasar dan menengah. Dikembangkan secara berkelanjutan oleh BSNP melalui evaluasi pemenuhan SNP oleh satuan pendidikan, penetapan SNP dan penyusunan strategi peningkatan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan. (3) siklus akreditasi satuan pendidikan. Secara berkelanjutan dikembangkan oleh BAN-S/M melalui evaluasi mutu satuan pendidikan, audit mutu eksternal, dan penetapan akreditasi. Dalam menjalankan kewenangannya BSNP dan BAN-S/M memanfaatkan data dan informasi hasil pemetaan mutu pendidikan yang tersedia dalam Sistem Informasi Mutu Pendidikan.<sup>22</sup>

Jadi jelas di sini terlihat, bahwa peran seorang kepala sekolah bukan hanya mampu menjamin mutu di dalam sekolah akan tetapi juga dapat menunjukkan nilai sekolahnya kepada dunia luar dengan pembuktian dari lembaga terkait yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Hal ini ditunjukkan dengan melakukan penilaian akreditasi oleh BAN S/M Provinsi dimana lembaga berada. Semakin tinggi standar yang diperoleh, tentunya semakin baik nilai sekolah di mata para peserta didik, orang tua dan masyarakat sekitar kita, bahkan seluruh warga Indonesia secara nasional.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Putri and Wibowo, "Pengaruh Kinerja Kepala Sekolah Terhadap Keberhasilan Manajemen Berbasis Sekolah Melalui Partisipasi Masyarakat Di SMP."

## Peran Kepala Sekolah Meningkatkan Kompetensi Dan Profesionalisme Guru di Daerah 3T

Kompetensi dan profesionalisme guru merupakan kualitas yang harus ditingkatkan. Kualitas pendidikan memiliki hubungan erat dengan kualitas guru atau pengajarnya. Peningkatan kualitas guru berdampak secara langsung kepada mutu dan peningkatan kualitas Pendidikan.<sup>24</sup> Peningkatan kualitas guru melibatkan banyak aspek, bukan hanya secara personal dari guru, namun juga dipengaruhi oleh sistem Pendidikan Nasional yang dikembangkan di suatu Negara.<sup>25</sup> Peran kepala sekolah dalam mendorong dan mentoring guru juga member pengaruh dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru.

### a. Penerapan *Students Centre Learning* (Pembelajaran yang berpusat pada siswa)

Dalam pembelajaran yang dilakukan berdasarkan Kurikulum 2013, maka pendekatan yang wajib dilakukan dalam proses pembelajaran adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa (*Students Centre Learning*). Pendekatan ini adalah pendekatan yang mendahulukan kepentingan dan kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan oleh Lembaga satuan Pendidikan. Setiap individu peserta didik

memiliki keunikan masing-masing dalam pembelajaran di sekolah. Dengan pendekatan ini maka sekolah sudah seharusnya memberikan ruang bagi para peserta didiknya untuk dapat belajar menurut ketertarikannya, kemampuan pribadinya, serta gaya belajarnya. Setiap peserta didik memiliki perbedaan secara alami dalam menyukai setiap mata pelajaran yang ada di sekolahnya, memiliki kemampuan intelektual yang berbeda dalam menyerap materi pelajaran yang diberikan, bahkan memiliki gaya yang juga berbeda dalam belajarnya. Di sinilah peran kepala sekolah yang harus memiliki kemampuan serta pengetahuan dalam melihat setiap keunikan dari peserta didiknya. Dengan pengetahuan dan kemampuannya maka kepala sekolah dapat mengambil perannya sebagai pemimpin lembaga satuan pendidikan dalam menempatkan setiap guru-gurunya pada masing-masing tugas dan tanggung jawabnya dalam membimbing dan melatih setiap peserta didik yang ada di lembaga satuan pendidikannya.

Pembelajaran yang berpusat pada siswa (*Student Centred Learning*) membuat seorang kepala sekolah menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan perannya sebagai pimpinan sekolah merdeka di lembaga satuan pendidikannya. Kepala sekolah mampu menjadi fasilitator bagi para guru dan peserta didiknya dalam membangkitkan rasa ketertarikan dalam proses belajar dan mengajar. Para guru yang ada dapat dilatih dan digerakkan menjalankan perannya dalam membimbing dan melatih para peserta didiknya menjadi tertarik dan antusias terhadap materi belajar yang diberikan oleh setiap guru yang ada. Peran kepala sekolah di

<sup>24</sup> P Adams and C McLennan, "Towards Initial Teacher Education Quality: Epistemological Consideration," *Educational Philosophy and Theory* 53, no. 6 (2021): 644–654.

<sup>25</sup> Gunnar Augustsson and Jimmy Jaldemark, "Online Supervision: A Theory of Supervisors' Strategic Communicative Influence on Student Dissertations," *Higher Education* 67, no. 1 (2016): 19–33.

sini adalah bagaimana melatih para guru dan menggerakkan tim guru mampu menyajikan materi belajarnya dengan metode belajar yang paling sesuai bagi setiap peserta didiknya. Tentunya hal ini tidak mudah namun juga tidak sulit selama setiap guru telah dilatih untuk mampu menjalankan perannya sebagai pendidik yang profesional dan dapat berintegrasi sesuai dengan tujuan sekolah merdeka.

Setiap guru yang ada harus dapat digerakkan oleh kepala sekolah secara profesional sehingga mampu mengenali setiap peserta didik yang ada. Setiap guru mampu mengenali dengan baik kemampuan intelektual setiap peserta didiknya. Tidak semua metode mengajar yang diberikan cocok bagi sebagian peserta didik. Cara belajar setiap peserta didik tentunya berbeda-beda. Bagaimana Kepala Sekolah mampu menjalankan perannya menggerakkan setiap gurunya dalam membantu para peserta didik dalam mengenali lingkungannya, kemudian berkolaborasi dengan teman, guru dan lingkungannya, bahkan dapat bekerjasama dalam *teamwork* mengerjakan dan menyelesaikan suatu *project* belajar yang diberikan oleh guru. Metode belajar ini tentunya juga dapat dikolaborasikan dalam sebuah permainan atau tantangan yang membuat cara berfikir para peserta didik lebih tertarik dan berinteraksi dalam proses penyelesaian masalah yang diberikan dalam materi pelajaran yang ada. Peran guru sebagai guru penggerak dalam sekolah merdeka belajar benar-benar harus diberikan dengan segenap kemampuan yang ada. Artinya mampu memberikan berbagai variasi belajar yang kooperatif dan inovatif pada berbagai metode belajar yang diberikan. Tentunya tehnik belajar

berkelompok juga diajarkan kepada peserta didiknya.<sup>26</sup>

Peserta didik pada pembelajaran berbasis *SCL* harus selalu didorong untuk mempunyai motivasi yang tinggi dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Peserta didik dimotivasi dengan cara sering melakukan diskusi sehingga murid berani mengemukakan pendapat serta belajar untuk memecahkan masalah. Peserta didik juga dibiasakan untuk dapat menyampaikan atau mempresentasikan pengetahuan yang dimilikinya. Dalam pembelajaran berbasis *SCL* murid juga tidak boleh takut dengan guru, jika murid memiliki ketakutan pada guru tidak bisa melakukan diskusi atau sharing dengan nyaman.<sup>27</sup> *Student Centered Learning* merupakan salah satu pendekatan pengajaran dalam pendidikan. Pendekatan ini memberikan kebebasan kepada para peserta didik memiliki kesempatan dan fasilitas menggali sendiri ilmu pengetahuannya sehingga mereka memperoleh pengetahuan yang mendalam (*deep learning*) dan mampu meningkatkan kualitas dirinya sendiri. Kembali di sini kepala sekolah berperan aktif dalam menggerakkan tim gurunya menjadi Guru Sekolah Merdeka yang trampil, inovatif dan bertanggung jawab.

## **b. Memberdayakan Sumber Daya Secara Optimal**

---

<sup>26</sup> Kadek Tenova Satriaman, Ni Made Pujani, and Putri Sarini, "Implementasi Pendekatan Student Centered Learning Dalam Pembelajaran Ipa Dan Relevansinya Dengan Hasil Belajar Siswa Kelas Viii Smp Negeri 4 Singaraja," *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sains Indonesia (JPPSI)* 1, no. 1 (2018): 12–22.

<sup>27</sup> Ibid.

Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh Hasthoro<sup>28</sup> pada lima Kabupaten area 3T, yang berada di Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Barat menunjukkan beberapa masalah pendidikan yang ada di daerah 3T yaitu: (1) Akses menuju sekolah jauh dan sulit ditempuh, dengan rata-rata jarak tempuh lima jam perjalanan kaki yaitu sekitar 149 km dari kabupaten terdekat. (2) Belum memiliki fasilitas pendidikan yang memadai, seperti buku teks yang ada hanya 39% nya saja. (3) Infrastruktur dan fasilitas fisik sekolah yang belum memadai, dengan kondisi jaringan listrik 29% sekolah saja, memiliki perpustakaan 54% dan hanya 17% sekolah yang memiliki jaringan wifi internet. (4) Komposisi, jumlah, serta kualifikasi guru tidak sesuai, terdiri dari 40% guru PNS, 42,5% guru honor yang dikontrak sekolah dan kabupaten, dan 34% adalah guru dengan Pendidikan terakhir SMA.

Hal yang sama juga dialami pada tujuh kecamatan daerah 3T di Kabupaten Natuna. Dalam kondisi tersebut kepala sekolah harus mengambil perannya untuk mengoptimalkan dalam memberdayakan sumber daya yang dimiliki oleh sekolahnya, sehingga program Merdeka Belajar di sekolahnya dapat diwujudkan dengan baik. Adapun peran yang dapat dilakukan kepala sekolah sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 Permendikbud No. 6 tahun 2018 menyatakan “bahwa beban kepala sekolah sepenuhnya melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.”

---

<sup>28</sup> Handoko Arwi Hasthoro and Nanik Ambarwati, *Analisis Sebaran Guru Dikdasmen Di Wilayah 3 T (Terluar, Terdepan Dan Tertinggal) TINJAUAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA*, Kemdikbud (Jakarta, 2016).

Berdasarkan pengamatan di lapangan, beberapa keterbatasan makin terlihat jelas saat masa pandemi *Covid-19* berlangsung, di mana beberapa sekolah di daerah 3T mengalami kesulitan dalam melakukan pembelajaran secara daring (*online*). Hal ini terjadi karena beberapa sekolah di daerah 3T belum memiliki sarana seperti: (a) Infrastruktur internet yang memadai, sehingga sinyal *wifi* belum terjangkau karena berada pada lokasi yang jauh di pedalaman, pegunungan bahkan hingga daerah pantai, (b) banyak orang tua dan siswa yang belum memiliki *smartphone*, (c) belum lagi keterbatasan waktu dan pengetahuan para orang tua dalam mendampingi anak-anaknya dalam belajar, (d) ditambah lagi lingkungan belajar siswa yang kurang nyaman, (e) bahkan para siswa yang belum terbiasa belajar mandiri, (f) hingga kurang memadainya buku pelajaran dan buku penunjang belajar lainnya.

Bukan hanya itu saja, para guru dan kepala sekolah juga memiliki keterbatasan seperti: (a) terbatasnya tenaga guru yang mau mengabdikan di daerah 3T, (b) buku pegangan guru mengajar yang minim, (c) kurangnya pertemuan musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Musyawarah Guru mata pelajaran (MGMP) yang diadakan di kabupaten atau kecamatan terdekat secara berkala, (d) jarak tempuh akibat infrastruktur yang belum memadai, (e) kurangnya sarana internet hingga *smartphone*, (f) keterbatasan pengetahuan teknologi yang dapat menunjang pengetahuan tambahan guru secara mandiri, (g) terbatasnya tenaga guru mata pelajaran yang sesuai dengan bidang keahliannya.

### Simpulan Dan Saran

Implementasi kepala sekolah dalam mewujudkan merdeka belajar pada masa pandemi di daerah 3T dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hal tersebut belum berjalan optimal, hal ini disebabkan jangkauan wilayah yang jauh, terdiri dari pulau-pulau, rasio jumlah siswa dengan jumlah sekolah dan jumlah guru masih jauh dari kata ideal dan sarana infrastruktur internet yang belum memadai, seperti sarana penunjang *smartphone* yang belum terpenuhi baik dari sisi guru maupun siswa, penggunaan aplikasi pembelajaran daring masih belum dikuasai dengan baik oleh guru maupun siswa.

Sedangkan peran kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dalam optimalisasi merdeka belajar di daerah 3T, dalam penelitian ini menunjukkan belum tercapai maksimal baik dalam pelaksanaan *student Centred Learning* dan kemampuan kepala sekolah dalam memberdayakan sumber daya yang ada secara optimal. Hal ini disebabkan minimnya sarana dan prasarana yang sangat komplek, yaitu meliputi: wilayah yang susah diakses, infrastruktur internet yang tidak tersedia, buku-buku penunjang yang terbatas, dan kurangnya guru atau pengajar yang sesuai dengan kompetensinya yaitu sesuai bidang studinya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti menyarankan untuk penelitian lebih lanjut terhadap kinerja kepala sekolah dan hubungannya dengan kemampuan manajerial, kepemimpinan dan supervisi yang dilakukan guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk menemukan formula

yang tepat bagi peran kepala sekolah di daerah 3T guna menanggulangi masalah akses dan infrastruktur yang terbatas.

### Daftar Pustaka

- Adams, P, and C McLennan. "Towards Initial Teacher Education Quality: Epistemological Concideration." *Educational Philosophy and Theory* 53, no. 6 (2021): 644–654.
- Augustsson, Gunnar, and Jimmy Jaldemark. "Online Supervision: A Theory of Supervisors' Strategic Communicative Influence on Student Dissertations." *Higher Education* 67, no. 1 (2016): 19–33.
- BPS Kabupaten Natuna. *KABUPATEN NATUNA DALAM ANGKA Natuna Regency in Figures 2021*. Natuna, 2021.
- Effendy, Muhadjir. "Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah." *Kemdikbud* (2018): 1–21.
- — —. "Permendikbud No. 28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Dan Menengah." *Kemdikbud* (2016): 1–18.
- Evimalinda, Rita, Rikardo Dayanto Butar-butur, and Efvi Noyita. "Membangun Semangat Kebangkitan Nasional Melalui Konten Pendidikan Agama Kristen Multikultural." *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta* 4, no. 1 (2021): 54–68.
- Harapan, Edi. "Visi Kepala Sekolah Sebagai Penggerak Mutu Pendidikan." *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)* 1, no. 2 (2017): 133–145.
- Hasthoro, Handoko Arwi, and Nanik Ambarwati. *Analisis Sebaran Guru Dikdasmen Di Wilayah 3 T (Terluar, Terdepan Dan Tertinggal) TINJAUAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA*. *Kemdikbud*.

Jakarta, 2016.

- Hendri, Nofri. "MERDEKA BELAJAR; ANTARA RETORIKA DAN APLIKASI." *Seminar Nasional: Jambore Konseling* 3 08, no. 01 (2020): 1–29.
- Mustaghfiroh, Siti. "Konsep ' Merdeka Belajar ' Perspektif Aliran Progresivisme Jhon Dewey." *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran* 3, no. 1 (2020): 141–147.
- Putri, Novi Hardini, and Udik Budi Wibowo. "Pengaruh Kinerja Kepala Sekolah Terhadap Keberhasilan Manajemen Berbasis Sekolah Melalui Partisipasi Masyarakat Di SMP." *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 6, no. 1 (2018): 45–59.
- Rosadi, Adi, Muh Hasan Marwiji, and Eneng Yeni Mariah. "Strategi Kepala Sekolah Dalam Pembinaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)." *Jurnal Jendela Pendidikan* 1, no. 3 (2021): 112–118.
- Sanoto, Herry, Soesanto, AT Soegito, and Kardoyo. "Pengaruh Supervisi Akademik Terhadap Peningkatan Kompetensi Guru Di Daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal)." ...: *Jurnal Pendidikan dan ...* 11, no. 2 (2021): 166–172.
- Satriaman, Kadek Tenova, Ni Made Pujani, and Putri Sarini. "Implementasi Pendekatan Student Centered Learning Dalam Pembelajaran Ipa Dan Relevansinya Dengan Hasil Belajar Siswa Kelas Viii Smp Negeri 4 Singaraja." *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sains Indonesia (JPPSI)* 1, no. 1 (2018): 12–22.
- Sudibyo, Bambang. "Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 13 Tahun 2007." Indonesia: Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Bandung: Alfabet, 2012.
- Suryaman, Maman. "Orientasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar." *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra* 1, no. 1 (2020): 13–28.
- Wahyuningsih, Kompyang Sri. "Problematika Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19 Di Sma Dharma Praja Denpasar." *Jurnal Pangkaja* 24, no. 1 (2021): 107–118.
- Wijaya, Hengki, Fransiskus Irwan Widjaja, and Dkk. *Strategi Menulis Jurnal Untuk Ilmu Teologi*. Semarang: Golden Gate Publishing, 2020.